

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PARKIR ILEGAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Feriyanti Barasa

Feriyantibarasa17@gmail.com

Pembimbing : Nur Laila Meilani

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The problem of this study includes the illegal parking on the edge of Pekanbaru's public roads caused by a number of things including limited public roadside parking due to provisions for parking, parking officers who use illegal parking locations, lack of coordination between relevant agencies and parking rates that do not in accordance with established regulations. The purpose of this study was to find out and analyze the strategy of the Pekanbaru City Transportation Agency in regulating illegal parking on the edge of Pekanbaru's public roads. This research method uses descriptive qualitative research methods. This research focuses on the strategy in regulating illegal parking using the SWOT analysis.

The results of the study indicate that the Department of Transportation in regulating illegal parking on the public road in the form of preventive actions. The focus of this research is the role of the Department of Transportation in responding to the problem of illegal parking, harmful illegal fees, and the number of vehicles parked on the road / sidewalk. The Department of Transportation has taken strict action to get a deterrent effect, in improving parking management efficiency which is one of the effectiveness in improving parking management in Pekanbaru City. The factor that became a supporter in creating the strategy of the Department of Transportation, namely that the Department of Transportation through the UPTD Parking of the City of Pekanbaru did not have a specific strategy in overcoming illegal parking. The recommended strategy used in overcoming illegal parking is to formalize illegal parking officers by providing new parking locations that are strategically located.

Keywords: Strategy, Illegal Parking, Parking Control

Latar belakang

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau, dan juga merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan pembangunan yang begitu pesat di Pulau Sumatera, salah satunya di bidang transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor. Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan di mulai dengan ditetapkannya Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi: ***”Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa”***.

Untuk mewujudkan Visi Kota Pekanbaru ini, Kota Pekanbaru terus berbenah dan terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun, dimana perkembangan ini meliputi perkembangan penduduk, sektor ekonomi, sosial, transportasi dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Dengan penambahan penduduk Kota Pekanbaru berdampak pada pertumbuhan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas dan kebutuhannya. Tetapi semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak pula jumlah pemakai kendaraan bermotor ini yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Seperti masyarakat yang tidak peduli fasilitas – fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di jalan umum Kota Pekanbaru dalam hal ini akan menimbulkan ataupun memancing pungutan – pungutan ilegal

oleh petugas parkir yang ilegal. Maka dari itu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perparkiran ke depannya.

Parkir adalah memangkalkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan, dan terminal. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut Retribusi Parkir yang mana Instansi Pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan yaitu bagian UPTD parkir, dimana objek yang diawasi oleh UPTD parkir tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, koodinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (*on street parkirng*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*).

No	Tahun	Target (Rupiah)	Target Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	2013	7.000.000.000	6.200.000.000	5.353.190.000
2.	2014	6.200.000.000	7.194.000.000	6.123.065.000
3.	2015	14.273.310.000	14.273.310.000	7.202.855.000
4.	2016	14.273.310.000	14.273.310.000	8.253.279.000
5.	2017	11.273.100.000	11.273.000.000	8.804.542.000

Tabel : Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel diatas dapat pula dilihat penerimaan retribusi parkir masih fluktuatif, hal ini disebabkan oleh lemahnya fungsi penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru, sehingga hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam peranannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wakil masyarakat Kota Pekanbaru dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir dengan menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir. Parkir diatur dalam perda Nomor 2 tahun 2009 angka 35 menyebutkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir dalam peraturan daerah Nomor 2 pasal 1 angka 38 yang menyebutkan fasilitas parkir pada badan jalan adalah (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru, maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang di pungut retribusinya kepada orang pribadi maupun atau badan.

Implementor dari perda No 2 tahun 2009 ini adalah Dinas Perhubungan. Dan ini menyebabkan tidak tertibnya perparkiran dan semakin macet. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi, pemerintah daerah menetapkan target retribusi. Adanya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar.

Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu; Parkir Legal dan Parkir Ilegal. Pada dasarnya kedua-duanya sama mengembankan tugasnya, parkir legal

dikelola oleh Dinas Perhubungan sedangkan parkir ilegal biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang petugas UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Parkir yang dikatakan Legal adalah parkir yang telah mengikuti Standar Operasi Prosedur, dan memiliki beberapa hal penting yang harus dikenakan oleh Juru Parkir seperti; baju parkir, karcis, dan kartu tanda anggota (KTA). Bila beberapa hal tersebut tidak ada dikenakan oleh Juru Parkir maka parkir tersebut dapat dikatakan ilegal.

Pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area pedestrian sebagai lokasi parkir.

Akibat yang ditimbulkan parkir , sebagai berikut :

1. Berkurangnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
2. Menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas

Berdasarkan catatan pengelolaan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

1. Titik lokasi parkir 1.053
2. Koordinator 123 orang
3. Juru parkir 1.115 orang

Penyelenggara dan Pengelolaan Perparkiran berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran adalah Dinas Perhubungan, pada Pasal 2 dijelaskan : Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir Umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, Pemerintah dan parkir insidentil dilakukan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Keputusan Walikota;

Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus; Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota; Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan :

1. Lalu lintas Kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
2. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa Pelayanan parkir;
3. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD parkir terhadap pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dishub tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa pengaturan roda 2 dan roda 4 sesuai marka parkir
2. Mengawasi kelengkapan/ketertiban kinerja juru parkir dilapangan
3. Untuk memeta kembali lokasi parkir yang kosong
4. Untuk menangkap atau memproses juru parkir yang ilegal
5. Mengawasi ketertiban dan pengamanan tempat parkir
6. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Mengawal dan mengawasi PAD kota Pekanbaru dalam bentuk retribusi parkir ditepi jalan umum.

Diberbagai tepi jalan umum yang ada di Kota Pekanbaru seringkali ditemui juru parkir ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal sistem perparkiran tepi jalan umum telah diserahkan secara langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengelola secara baik berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2009. Bahkan para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir ilegal dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut

terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan.

Kegiatan parkir ilegal juga semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan parkir ilegal sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata kota yang diharapkan terganggu. Dan lebih dari hal tersebut, pendapatan yang didapatkan kerap kali masuk ke dalam kantong pribadi. Padahal sudah diberlakukan peraturan untuk kegiatan parkir tepi jalan agar memberi kontribusi juga terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga target untuk pendapatan dari kegiatan parkir yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sedikit banyak akan berkurang jumlahnya..

Berdasarkan hasil observasi pra-riset yang penulis lakukan terhadap pengelolaan perparkiran, ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Tidak ada kontrak kerja sama antara pengelola dengan pelaksana parkir.
2. Masih ada petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir umum.
3. Ditemukannya petugas parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal petugas parkir saat melakukan tugas parkir umum di Kota Pekanbaru.

Melihat fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih

lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Dimana penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

“ Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru ”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir ilegal di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemikiran penulis, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Menambah bahan pustaka dalam Administrasi Publik khususnya, mengenai Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal

dan dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Konsep Teori

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan isi dan tujuan penelitian. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk memperjelas tentang variabel yang akan diteliti. Adapun teori yaitu sebagai berikut:

1. Strategi

Menurut **Salusu (2004 : 85)**, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* atau *Strategis* dengan kata jamak *Strategis*. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state office*) dengan fungsi yang luas. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sarana). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi adalah rencana yang *disatukan* : strategi mengikuti sarana bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu *menyeluruh* : strategi meliputi semua aspek penting dalam perusahaan. Strategi itu terpadu : semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersedesuai.

Menurut **Chandler dan Rangkuti (2006 : 4)** menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan/organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan”. Pemahaman yang baik mengenai konsep

strategi dan konsep-konsep strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Distinctive Competence

Merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan/organisasi agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan/organisasi yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan/organisasi pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki “*Distinctive Competence*”. *Distinctive Competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi

b. Competitive Advantage

Merupakan kegiatan spesifik, yang dikembangkan oleh perusahaan/organisasi agar dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pemilihan strategi yang dilakukan oleh perusahaan peluang pasar.

Menurut **Taufiq Amir (2011:10)** sebuah keputusan disebut keputusan strategik apabila memenuhi tiga karakteristik diantaranya:

1. Jarang dibuat.

Sebuah keputusan strategis selalu memiliki implikasi luas dalam organisasi. Oleh karena itu tidak bisa diambil secara sembarangan dengan cukup sering terutama jika dimensi waktunya akan memakan waktu panjang.

2. Signifikan, penting.

Derajat keputusan strategis selalu penting dan melibatkan sumber daya dan komitmen yang besar.

3. Berdampak Luas

Keputusan strategik berdampak luas dan menjadi dasar bagi keputusan keputusan selanjutnya bagi seluruh organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebuah strategi

harus memuat tiga karakteristik tersebut untuk membedakan sebuah langkah yang diambil merupakan sebuah strategi atau bukan strategi.

Karyoso (2005 : 32) mendefinisikan manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran, di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting antara lain :

- a. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan.
- b. Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara melaksanakannya atau cara pencapaiannya.
- c. Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasi.
- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi dalam arti seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- e. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan

yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Menurut David (2006 : 8) strategi manajemen adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu mengaitkan keunggulan, strategi pemerintah dengan tantangan lingkungan dan direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh penyelenggaraan pemerintah.

Barry dalam **Tripomo dan Udan (2005 : 17)** mengatakan bahwa strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute). Ada 3 hal menurut **Tangkilisan (2005)** yang selalu menjadi perhatian dalam setiap merumuskan suatu strategi secara efektif adalah sebagai berikut :

1. Mandat

Merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan hukum, yang secara formal yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara organisasi mandat meliputi berbagai kewajiban, tugas, fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi.

2. Visi

Visi adalah gambaran atau kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang, ini berarti visi merupakan suatu perkiraan yang melampaui realitas sekarang, suatu keadaan yang diciptakan, yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh anggota organisasi.

3. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan. Misi merupakan output dan pelayanan yang optimal untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat.

2. Analisis SWOT sebagai salah satu komponen dari Manajemen Strategi

Menurut **Ford R. David (2004)** mengemukakan manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Seperti yang tersirat dalam definisi, fokus manajemen strategi terletak pada memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, produksi/operasi, penelitian dari pembangunan, serta sistem informasi computer untuk keberhasilan organisasi.

Selanjutnya, **Fakih (2005)** mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu.

Menurut **Fakih (2005)** langkah yang diperlukan dalam perencanaan strategi yaitu :

1. Mengidentifikasi mandat (tupoksi organisasi).
2. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
3. Menilai langkah eksternal.
4. Memulai langkah internal.
5. Mengidentifikasi isu-isu strategi yang dihadapi organisasi.

6. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.
7. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses.

Dan juga menurut **Tripomo, Tedjo, dan Udan (2005:35)** suatu analisa strategi harus memperhatikan faktor-faktor SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yakni sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
 - c. Cukup tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung.
 - d. Adaya kesadaran masyarakat
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Kurang profesionalnya aparatur.
 - b. Belum membudayakan transparansinya pengelolaan manajemen yang baik.
 - c. Belum terakumulasinya kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan.
 - d. Belum tersedianya data yang akurat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Adanya kesempatan usaha.
 - b. Adaya perkembangan dari dunia usaha (globalisasi).
 - c. Tersedianya lintas sektorial.
 - d. Meningkatnya mobilitas barang dan jasa.
 - e. Adanya koordinasi antar instansi terkait.
4. Ancaman (*Threat*)
 - a. Dampak ekonomi yang berkepanjangan.
 - b. Situasi keamanan yang kurang kondusif.
 - c. Geografis yang tidak mendukung.

- d. Komunikasi kurang lancar.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi dasar adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT bisa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun lingkungan internal perusahaan **Kuncoro (2005:50)**.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, visi, tujuan dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut analisis situasi yaitu model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif penulis melakukan dalam meneliti masalah “Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru”. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif, dimana peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Data yang diperoleh seperti

pengamatan, hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan, hasil pemotretan dan analisis dokumen, catatan lapangan, kemudian disusun sehingga menjadi serangkaian hasil penelitian yang tidak berupa rekayasa.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini ditetapkan di Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan Kota Pekanbaru karena pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada maraknya aktivitas perparkiran, baik yang legal maupun ilegal. Selanjutnya, UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan menjadi instansi yang dianalisis sebab kewenangan penyelenggaraan dan penataan perparkiran berada dibawah instansi ini.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang akan dijadikan informan dalam penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang konteksnya. Untuk melengkapi data penelitian, penulis membutuhkan informan yang dianggap mendalami masalah ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kabid UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru

2. Staff Pelayanan Administrasi Dishub Kota Pekanbaru
3. Masyarakat
4. Juru parkir

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan lengkap. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang penulis dapatkan ini bersumber dari :

1. Data Primer

Data Primer ini adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dokumen dari dinas terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencapaian tujuan dalam suatu penelitian harus menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang tepat.

Berhasil tidaknya suatu penelitian banyak tergantung pada ketepatan instrumen serta metode yang dipakai dalam mengumpulkan data atau informan yang dibutuhkan. Penulis dalam usaha untuk memperoleh data menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018. Persiapan dalam melakukan wawancara penelitian ini peneliti terlebih dahulu menetapkan informan yang akan diwawancarai, yang kedua penelitian mempersiapkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan Kabid UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru, yang ke dua Staff Pelayanan Administrasi Dishub Kota Pekanbaru, dan Masyarakat kemudian Juru Parkir.

2. Observasi

Observasi ini tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap hal yang terdengar. Dalam melakukan observasi peneliti mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, metode dokumentasi juga penulis lakukan. Metode ini sangat membantu

penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian penulis.

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 244), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai kegiatan check, recheck, dan crosscheck melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

Adapun langkah-langkah data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan

Strategi merupakan sebuah proses yang meliputi alat untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya. Strategi pada hakikatnya perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Tripomo (2005) mengemukakan Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*), kebijakan-kebijakan (*policy*), dan tindakan/program organisasi. Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Strategi sangat penting bagi pemerintah dalam mengatasi masalah parkir ilegal dimana langkah-langkah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah parkir ilegal menjadi sangat penting dalam menertibkan juru parkir ilegal. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini sedang berupaya untuk menertibkan parkir ilegal yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dituntut harus mengetahui kondisi eksternal organisasi demi mencapai rencana yang akan dilaksanakan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ada.

Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan untuk mengetahui faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang akan dihadapi organisasi, sehingga strategi tersebut searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi. Strategi harus melihat faktor internal organisasi yakni kekuatan dan kelemahan yang akan dapat digunakan untuk melaksanakan strategi kemudian melihat dan merumuskan faktor eksternal yaitu ancaman dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat berjalan konsisten.

Strategi dalam mencapai tujuan organisasi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin seperti inilah yang cerdas dalam memimpin serta mengarahkan organisasi maju ke depan, dan bukan pada hanya rutinitas organisasi.

Kegiatan analisis organisasi juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah. Dengan menggunakan analisis menyeluruh dan tepat, maka sang pemimpin akan tetap mengambil keputusan serta lebih memberdayakan pelaku-pelaku organisasi. Selain itu dalam berbagai masalah dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan orang lain, namun dapat

secara lebih bijak memutuskan serta pemecahan lebih pada sumber masalah.

Melihat paparan diatas dapat disimpulkan analisis sangat penting dalam kehidupan organisasi. Salah satu contoh analisis yang sangat mudah dan sangat efisien untuk digunakan adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats), atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dengan menggunakan SWOT organisasi akan lebih mudah memetakan berbagai potensi internal dan eksternal, serta menemukan strategi yang tepat untuk pengembangan selanjutnya atau pencapaian tujuan tertentu. Dengan SWOT organisasi akan mengembangkan kekuatan potensial dengan memanfaatkan peluang, serta menekan pengaruh dari kelemahan yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi.

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) suatu organisasi dan peluang-peluang (Opportunities) serta ancaman-ancaman (Threats) dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi organisasi. Hal ini melibatkan penentuan tujuan organisasi dan mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu.

2. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat secara lebih rinci dapat diuraikan mengenai faktor penghambat peran Dinas Perhubungan

dalam menciptakan sistem parkir otomatis antara lain:

1. Lahan Parkir

Permasalahan kota yang demikian menimbulkan pertanyaan bahwa seharusnya yang ditangani apakah dengan pembangunan lahan parkir atau pengendalian kendaraan pribadi. Pembangunan lahan parkir merupakan salah satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir ilegal yang menggunakan sebagian badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi padahal seharusnya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Tetapi jika tidak dilakukan penyediaan lahan parkir juga akan mendorong orang untuk parkir ilegal dengan alasan kurangnya lahan parkir. Dua hal tersebut memang ada dasarnya masing-masing yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan nantinya. Jumlah lahan yang tidak bertambah tetapi jumlah produksi dan pengendara kendaraan pribadi menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi permasalahan kemacetan ada sebagian orang yang menganggap seharusnya upaya dilakukan dengan pengendalian jumlah kendaraan pribadi dengan menerapkan pajak tinggi dan biaya SIM bagi pengendara diperbesar. Menurut beberapa orang hal tersebut akan sangat signifikan mengurangi kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat. Tetapi disisi lain produksi kendaraan yang tinggi juga akan menambah pendapatan negara dan penciptaan tenaga kerja. Sehingga perlu adanya analisis lebih

mendalam sehingga dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih baik.

2. Lapangan Pekerjaan Tukang Parkir terancam digantikan mesin

Teknologi kini memasuki kehidupan sehari-hari pada taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari komputer, telepon pintar, mesin cetak 3D, sampai perangkat medis, perangkat lunak dan mobil bertenaga listrik kini tersedia, tidak hanya di-negara maju tapi hampir seluruh dunia. Raksasa mesin pencari diInternet, Google mengumumkan, pihaknya sedang dalam tahap akhir mengembangkan kendaraan yang bisa mengemudi sendiri tanpa supir. Sementara mesin-mesin ini semakin canggih, apa dampaknya pada kehidupan manusia terutama jika sistem parkir digantikan dengan sistem parkir otomatis. Banyak orang mencari hal dalam parkir dengan kualitas baik, keamanan terjamin, dan lebih percaya pada teknologi hal ini dikui bahwa dampak besar lainnya kurang positif. Di masa depan, mesin-mesin pintar akan menggantikan manusia dalam berbagai pekerjaan, sehingga tenaga kerja kurang terampil akan kehilangan pekerjaan. Teknologi semakin maju dan membuat banyak orang menjadi terbelakang. Kita akan menyaksikan ketimpangan dalam hal pendapatan, kesejahteraan, kesempatan, mobilitas, dan ini semua merupakan tantangan serius yang harus dihadapi. Sebagian orang merasa terancam dengan berbagai tantangan ini sebaiknya memanfaatkan peluang baru yang disediakan oleh teknologi. Kesejahteraan masyarakatpun yang bergantung pada pekerjaan sebagai juru parkir harus dipikirkan lebih matang jika sistem parkir otomatis ini diterapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru belumlah berjalan efektif. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak memiliki strategi khusus dalam menertibkan parkir ilegal. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir ilegal secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir ilegal adalah meresmikan petugas parkir ilegal dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis.
2. Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa Faktor-faktor yang menghambat Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru antara lain; masih adanya jukir-jukir nakal yang tetap melakukan pungutan ilegal, masih adanya jukir-jukir ilegal yang mendiami kawasan parkir, sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam hal penyediaan lahan parkir dan titik-titik lokasi parkir.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dianggap relevan dan dapat membantu

strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal di kota Pekanbaru, antara lain:

1. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selain menyediakan lahan parkir juga seharusnya dan hendaknya lebih tegas lagi menindak juru parkir ilegal yang seenaknya menentukan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dengan memberikan pemahaman tentang undang undang tentang peraturan parkir. Masalah juru parkir ilegal yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hendaknya segera didaftarkan dan ditempatkan pada parkir *on street* yang tidak menimbulkan kemacetan.
2. Membentuk tim pengawas khusus perparkiran. Tim pengawas dapat dibentuk menjadi beberapa bagian dan mengawasi di setiap titik yang berpotensi menjadi parkir ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru.

Daftar pustaka

- Amir, M. Taufiq. 2012. *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ansoff, 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta: LP3ES
- Bodgan dan Taylor, Moeung, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Elekmedia Jakarta
- Byson. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Bina aksara
- Djokrominoto, Bintaro. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta: BP Jakarta
- Ellitan, Lena dan Lina. 2008. *Manajemen Strategi Operasi Teori dan Riset di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, Mansor. 2005. *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fred, R David. 2004. *Manajemen Strategi*, diterjemahkan oleh Krisno Saroso. Jakarta: Gramedia.
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnadi. 2000. *Pengantar Manajemen Strategi*, Malang: Penerbit Hasan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanto, Iwan. 2008. *Manajemen Strategi*, Bandung: CV. Yrama Widya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabetha.
- Tripomo, Tedjo dan Udan. 2005. *Manajemen Strategi*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Strategi Koorporat dan Strategi Bisnis Perusahaan*, Jakarta: Harvarindo.
- Wilcox, Dennis L, Philip H. Ault, Warren K. Agee. 2006. *Public Relations Strategi dan Taktik*. Jilid 2. Batam: Interaksara.
- Morissan. 2010. *Manajemen Publik Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana.